

Jakarta, 6 Juli 2025

Yth,

Bapak Gibran Rakabuming

Wakil Presiden Republik Indonesia

Perihal : Anak Tidak bisa ikut ujian sekolah dan akan penundaan PKL karena belum bisa membayar cicilan sekolah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersama ini saya : **Gusti Citra Yudha**, orang tua dari kedua anak saya yang bernama :

- **Muhammad Habibi AlFattih**
- **Muhammad Hasbi AlFattah (penerima beasiswa Lieco foundation)**

Ingin menyampaikan keluhan mengenai kondisi pendidikan kedua anak saya, yang saat ini keduanya bersekolah di **SMK Sahid, Ciracas, Jakarta Timur**.

Kedua anak saya (kembar) bersekolah di SMK Sahid saat ini duduk di kelas XI konsentrasi Kuliner B dan saat ini sudah naik ke kelas XII.

Sejak setahun terakhir kondisi keuangan keluarga saya sedang tidak stabil dan cenderung minus yang berakibat tertundanya/terganggunya pembayaran uang sekolah kedua anak saya. Namun, saya tetap mencoba untuk mencicil semampu saya sebagai itikad baik kesungguhan saya agar kedua anak saya tetap mendapatkan pendidikan yang kayak.

Kronologi

- Pada tanggal 18 Juni 2025, istri saya datang kesekolah atas dasar undangan diskusi yang disampaikan oleh wali kelas Kuliner B (ibu Sandra) melalui whatsapp.
- Istri saya datang kesekolah pada tanggal tersebut pada sekitar jam 10:00WIB dan bertemu pihak sekolah yang dihadiri : **Wakil Kepala Sekolah, Bapak Riki - Kepala Keuangan, Ibu Wiwi dan Wali Kelas Kuliner B, Ibu Sandra**.

- Pihak sekolah dalam hal ini Bapak Riki menanyakan **kapan bisa membayar tanggungan uang sekolah 2 anak sebesar Rp 18 juta rupiah.**
- Istri saya mengatakan **nanti sore ada dana Rp 2,5 juta.**
- Kepala keuangan, ibu Wiwi bertanya : **Apakah itu untuk 1 anak? Kapan kelarnya? Karena manajemen sekarang beda, harus lunas.**
- Istri saya menjawab : **untuk 2 anak, karena saat ini ada dana sebesar itu.**
- Wakil Kepala Sekolah, Bapak Riki bertanya : **Sisanya kapan? Karena masih banyak.**
- Istri saya menjawab : **saya belum tahu, tidak bisa menentukan tanggal karena saat ini suami saya masih mengusahakan, karena kondisi keuangan sedang sulit.**
- Wali Kelas, Bu Sandra berkata dengan nada tidak menyenangkan : **Kok sampe 8 bulan ga bayar-bayar? (padahal kami ada membayar/mencicil sebesar Rp 4 juta untuk 2 anak pada bulan mei 2025, namun dianggap kurang, hingga akhirnya kedua anak saya tidak bisa ikut ujian dan sempat tertunda untuk Sidang Project Worknya)**
- Istri saya menjawab karena merasa tertekan (disini ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak sekolah yang masuk ke ranah pribadi kami) istri saya **akhirnya dengan terpaksa menyebutkan angka Rp 6 juta akan dicicil akhir bulan Juni.**
- Wakil Kepala Sekolah, Pak Riki bertanya : **6 juta Untuk 1 atau 2 anak?**
- Istri menjawab **untuk 2 anak.**
- Wakil Kepala Sekolah, Pak Riki berkata : **Sisanya kapan lagi? 6 juta untuk 2 anak? Kekurangannya kapan lagi?.**
- Karena merasa tertekan, terutama setelah ditanya-tanya masalah pribadi keluarga. Istri saya spontan **menyebut angka Rp 6 juta untuk 1 anak.**
- Wakil kepala sekolah, **pak Riki kemudian meminta istri saya untuk membuat surat perjanjian pembayaran, yang isinya bahwa agar membayar Rp 12 juta untuk 2 anak, dan dicantumkan maksimal paling lambat pembayaran pada tanggal 30 juli 2025. Jika tidak sesuai, maka kedua anak saya tetap tidak bisa ikut ujian dan PKLnya akan ditunda.**

- Surat perjanjian tersebut dibuat tulis tangan oleh istri saya sendiri didepan wakil kepala sekolah, kepala keuangan dan wali kelas.
- Istri saya sempat **diminta merubah isi redaksi surat perjanjian dari kalimat “tidak boleh ikut PKL....” diminta ganti menjadi kalimat “tidak diperkenankan ikut PKL”.**
- **Sore harinya pada tanggal yang sama, Istri saya mentransfer ke rekening sekolah sebesar Rp 2,5juta untuk 2 anak saya. Minggu Depannya kedua anak saya bisa sidang Project Work, namun belum bisa ikut ujian susulan, hingga saat ini.**
- Pada tanggal 30 Juni 2025, saya dan anak saya, Hasbi, datang ke sekolah bertemu dengan wakil kepala sekolah, Pak Riki untuk diskusi ulang terkait tenggat waktu.
- Pak Riki menyebutkan bahwa istri saya sudah membuat surat perjanjian, dan patokannya adalah surat perjanjian tersebut.
- Saya menyampaikan bahwa saat ini saya sedang proses menjual aset tanah dan rumah agar bisa membayar uang sekolah tersebut, dan meminta agar hak pendidikan anak saya jangan ditunda (ujian dan PKL nya)
- Pak Riki memberikan tenggat waktu sampai tanggal 6-7 juli 2025 untuk segera membayar dengan nominal sesuai surat perjanjian.
- Saya menyampaikan kembali bahwa saat ini sedang proses menjual aset tanah dan rumah, tidak bisa segera langsung laku, namun saya tetap akan mengusahakan. Saya tidak menyetujui tanggal jatuh tempo 6-7 Juli tersebut. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusahakan sebaik mungkin.
- Namun, Wakil Kepala Sekolah mengatakan tetap akan kembali ke surat perjanjian awal jika tidak bisa membayar, PKL akan di tunda dan ujian susulan belum bisa ikut.
- Anak saya, Hasbi sempat partime di kafe (tanggal 29 Juni 2025) untuk mencari tambahan dana membantu keuangan keluarga dan saat ini Hasbi juga kerja sampingan di J&T.

Sampai saat ini saya masih proses menjual aset tanah dan rumah, dan sudah beritikad untuk membayar uang sekolah kedua anak saya. Besar harapan saya agar kedua anak saya tetap dapat menerima hak pendidikannya sesuai dengan diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- **Pasal 31 ayat (1):** "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan."

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1): "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."

Kiranya negara dapat hadir untuk menengahi masalah ini, sesuai dengan **Pasal 11 ayat (1):**

"Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi."

Saya merasa kedua anak saya mendapatkan diskriminasi dari pihak sekolah, karena saya belum bisa membayar sisa uang sekolah yang berakibat kedua anak saya tertunda ujiannya dan mendapatkan ancaman akan di Tunda PKL - nya.

Demikian surat aduan atau keluh kesah ini saya buat. Semoga mendapatkan perhatian dan bantuannya dari bapak.

Hormat Saya,



Gusti Citra Yudha

Tembusan :

- KPAI
- LBH Mawar Saron
- Dewan Pers Indonesia
- Aliansi Jurnalist Independen, Bidang Pendidikan, Etika & Profesi
- Aliansi Jurnalist Independen, Bidang Gender, Anak dan Marjinal